

# Signifikansi Peran Perempuan Adat Papua Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan

Nurinaya<sup>1)</sup>, Etik Siswatinigrum<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

e-mail : [nurinaya321@gmail.com](mailto:nurinaya321@gmail.com)<sup>1)</sup>, [etik.ningrum16@gmail.com](mailto:etik.ningrum16@gmail.com)<sup>2)</sup>

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2023

Accepted: 19-06-2025

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords:

Indigenous women, Papua, Sustainable Climate

Indigenous Papuan women play a crucial role in environmental conservation and adaptation to climate change, which increasingly threatens the sustainability of Indigenous communities. Through traditional knowledge passed down across generations, these women possess deep skills and understanding of sustainable natural resource management. This study aims to comprehensively explain the roles, strategies, and experiences of Indigenous Papuan women in contributing to climate change mitigation and adaptation efforts within the context of their daily lives. Using an explanatory qualitative approach, this research seeks to explore the meaning and dynamics of these roles through narratives from within the community. Data collection techniques included literature review, in-depth interviews with Indigenous women who are recognized as environmental leaders in their communities, participatory observation of daily activities related to natural resource management, as well as examination of customary documents and local environmental policies. The results show that Indigenous women are actively involved in activities such as customary forest conservation, rotational garden management, protection of water sources, and the preservation of medicinal plants. They also serve as guardians of cosmological and spiritual values that shape the community's perspective toward nature. However, these women still face various structural challenges, such as marginalization in decision-making spaces and a lack of formal recognition of their ecological roles in public policy. This imbalance highlights a gap between technocratic climate policies and the lived experiences at the community level. This study recommends the need for culturally grounded and gender-inclusive policy approaches, with formal recognition of Indigenous women's knowledge and contributions.

### Abstrak

Perempuan adat Papua memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin mengancam keberlanjutan hidup komunitas adat. Melalui pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, perempuan adat memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh bagaimana peran, strategi, dan pengalaman perempuan adat Papua

**Kata Kunci:** Perempuan Adat, Papua, Iklim Berkelanjutan

berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif, penelitian ini berusaha menggali makna dan dinamika peran tersebut melalui narasi dari dalam komunitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara mendalam terhadap perempuan adat yang menjadi tokoh lingkungan di komunitasnya, observasi partisipatif terhadap aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan alam, serta telaah dokumen adat dan kebijakan lingkungan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan adat terlibat aktif dalam kegiatan seperti konservasi hutan adat, pengelolaan kebun berbasis rotasi alam, perlindungan sumber mata air, dan pelestarian tanaman obat-obatan. Mereka juga menjadi penjaga nilai-nilai kosmologis dan spiritual yang memengaruhi cara pandang komunitas terhadap alam. Namun demikian, perempuan adat masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti marginalisasi dalam ruang pengambilan keputusan dan minimnya pengakuan formal terhadap peran ekologis mereka dalam kebijakan publik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan iklim yang bersifat teknokratik dan pengalaman nyata di tingkat komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang berbasis budaya dan gender inklusif, dengan pengakuan formal terhadap pengetahuan dan kontribusi perempuan adat.

---

## A. PENDAHULUAN

Krisis iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak di abad ke-21. Dampaknya tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, terutama bagi komunitas rentan seperti masyarakat adat dan perempuan. Di tengah upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terus digalakkan secara global, peran masyarakat adat, khususnya perempuan adat Papua, masih kurang diperhatikan secara proporsional. Papua merupakan wilayah dengan ekosistem yang sangat penting bagi ketahanan iklim dunia. Kawasan hutan hujan tropisnya menyimpan cadangan karbon besar dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dalam konteks ini, perempuan adat Papua memainkan peran vital dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik pertanian tradisional, pelestarian hutan, pengelolaan air, serta pengajaran nilai-nilai ekologis dalam komunitasnya.<sup>1</sup>

Namun, peran ini kerap tak diakui dalam kebijakan lingkungan maupun forum pengambilan keputusan terkait iklim. Banyak kebijakan konservasi maupun pembangunan justru mengabaikan suara perempuan adat, bahkan berdampak pada hilangnya akses mereka terhadap tanah adat dan sumber daya alam.<sup>2</sup> Padahal, perempuan adat memiliki pengetahuan lokal yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika iklim, menjadikan mereka aktor penting dalam strategi iklim berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Lorenz Gonsalves dan Maria Kambuaya, "Peran Perempuan Adat Papua dalam Pelestarian Hutan dan Pengetahuan Lokal," *Warta Lingkungan Papua*, Vol. 6, No. 1 (2020): 22–30.

<sup>2</sup><https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-perempuan-adat-dengan-alam-di-tanah-papua>

Dalam konteks pembangunan dan kebijakan iklim nasional maupun daerah, sering kali pendekatan yang digunakan masih bersifat *top-down* dan cenderung mengabaikan kearifan lokal serta struktur sosial budaya masyarakat adat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan, yang berimplikasi pada kurang optimalnya hasil intervensi lingkungan. Oleh karena itu, memahami signifikansi peran perempuan adat Papua dalam upaya iklim berkelanjutan menjadi krusial untuk mendorong inklusivitas, keadilan ekologis, serta efektivitas kebijakan lingkungan.

Dalam perspektif ekofeminisme, krisis ekologi dan penindasan terhadap perempuan berakar pada struktur dominasi yang sama yakni sistem patriarki dan kapitalisme ekologis.<sup>3</sup> Oleh karena itu, mewujudkan keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur dan kebijakan yang selama ini belum secara serius memasukkan perempuan adat sebagai subjek aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan adaptasi iklim. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna, praktik, dan tantangan yang dihadapi perempuan adat Papua dalam menjaga lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna subjektif, nilai-nilai budaya, serta interaksi sosial yang membentuk praktik dan peran perempuan adat Papua dalam konteks pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.<sup>4</sup> Eksplanatif berarti bahwa selain menggambarkan fenomena, penelitian ini juga berusaha menjelaskan sebab-akibat, hubungan antar variabel kualitatif, dan faktor-faktor yang memengaruhi realitas sosial tertentu. Dalam konteks ini, eksplanasi difokuskan pada bagaimana sistem adat, struktur gender, dan nilai kosmologis berkontribusi terhadap praktik ekologis perempuan adat. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 4 cara yaitu : a) wawancara mendalam (*In-depth Interview*) untuk menggali narasi, pandangan, pengalaman, dan interpretasi subjek terhadap peran mereka dalam pelestarian lingkungan dan respon terhadap perubahan iklim. b) Observasi Partisipatif peneliti ikut terlibat langsung atau mengamati kegiatan-kegiatan ekologis perempuan adat, seperti kegiatan berkebun, meramu obat, atau diskusi adat. Observasi ini membantu memahami konteks sosial dan simbolik dari tindakan yang mereka

---

<sup>3</sup> Sartika Intaning, "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria," *BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5, No. 1 (2019): 70-73

<sup>4</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 179.

lakukan. c) Studi Pustaka untuk mengkaji teori-teori utama yang digunakan, seperti *ekofeminisme*, *kearifan lokal*, dan *keadilan iklim*, serta menelusuri hasil penelitian terdahulu yang relevan. d) Studi Pustaka dokumen yang dikaji meliputi aturan adat, peraturan kampung, catatan pertemuan adat, dan kebijakan lokal tentang lingkungan. Ini memberikan perspektif struktural dan kelembagaan terkait pengakuan terhadap perempuan adat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1 Pendekatan Feminisme Interseksional (Ekofeminisme)

Ekofeminisme merupakan cabang dari teori feminisme yang menyoroti keterkaitan antara eksploitasi terhadap lingkungan dan penindasan terhadap perempuan. Kerusakan lingkungan yang luas sering kali disebabkan oleh cara pandang antroposentris, yakni pandangan bahwa alam ada semata-mata untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ekofeminisme menjelaskan bahwa dominasi manusia atas alam didorong oleh nilai-nilai maskulin yang identik dengan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan.<sup>5</sup> Sistem patriarki yang mengedepankan nilai-nilai tersebut turut memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang tertindas. Ekofeminisme tidak hanya menunjukkan kesamaan posisi antara perempuan dan alam sebagai pihak yang tertindas, tetapi juga melihat adanya kedekatan khusus antara perempuan dan alam. Kedekatan ini tidak hanya berasal dari peran biologis perempuan dalam memelihara kehidupan, tetapi juga dari peran sosial mereka dalam menyediakan kebutuhan dasar. Kedekatan ini membawa dampak ganda: perempuan lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan, namun mereka juga berpotensi menjadi agen penting dalam perlindungan dan pelestarian alam. Dalam hal ini, perempuan diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai feminitas yang menekankan kesetaraan antara manusia dan alam demi mencapai keadilan ekologis dan gender.

Namun, seiring berkembangnya kajian, muncul kritik terhadap pendekatan ekofeminisme yang dinilai kurang mampu menangkap keragaman pengalaman perempuan. Salah satu pendekatan baru yang muncul adalah ekofeminisme interseksional. Pendekatan ini tetap mengakui adanya hubungan antara marginalisasi alam dan perempuan, tetapi dengan penekanan bahwa dampak eksploitasi tidak hanya ditentukan oleh gender, melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti kelas sosial, seksisme, homofobia, kasta, dan rasisme.<sup>6</sup> Karena identitas perempuan sangat kompleks, analisis atas relasi antara perempuan dan lingkungan perlu mencakup dimensi lain

---

<sup>5</sup> Vandana Shiva, *Biopolitics: A feminist critique*, dalam Maria Mies & Vandana Shiva, *Ecofeminism* (London: Zed Books, 1997), 66–81.

<sup>6</sup> A. E. Kings, "Intersectionality and the changing face of ecofeminism," *Ethics and the Environment* 22, no. 1 (2017): 63–87.

seperti ras, etnis, agama, dan latar belakang sosial lainnya.

Ekofeminisme interseksional penting untuk menghindari penyamarataan pengalaman perempuan dalam menghadapi krisis lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di wilayah global selatan, terutama di pedesaan, lebih terdampak oleh kerusakan lingkungan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya mengakui keunikan kontribusi perempuan dalam menjaga lingkungan, serta mendorong partisipasi mereka dari berbagai latar belakang dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan bebas diskriminasi.<sup>7</sup>

Sebagai kerangka teoritis, ekofeminisme interseksional sangat relevan untuk memahami isu-isu yang kompleks dan berlapis, termasuk norma budaya dan relasi kekuasaan yang melingkupi kehidupan perempuan adat. Dalam konteks ini, feminisme indigenous menjadi salah satu cabang dari feminisme interseksional yang khusus membahas hubungan antara perempuan, ras, dekolonisasi. Ekofeminisme indigenous yang menyoroti relasi simbolis antara perempuan dan alam, serta peran mereka dalam konservasi ekologis. Perempuan adat, dalam pandangan ini, bukan hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga sebagai pencari nafkah melalui kegiatan seperti berburu dan menangkap ikan.<sup>8</sup>

### **1. Urgensi Iklim Berkemajuan Di Papua**

Papua sebagai salah satu kawasan terakhir di Indonesia yang masih memiliki hutan hujan tropis yang luas dan relatif utuh. Hutan Papua mencakup lebih dari 33 juta hektare dan berperan sebagai penyerap karbon yang sangat penting dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain itu, Papua juga merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik, serta tempat hidup bagi ratusan komunitas adat yang sangat bergantung pada alam untuk kebutuhan pangan, air, obat-obatan, dan budaya. Namun, tekanan terhadap lingkungan di Papua semakin meningkat akibat ekspansi industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan hak masyarakat lokal.

Upaya menghadapi perubahan iklim harus dilandasi prinsip keberlanjutan dan tidak bersifat jangka pendek semata. Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk merespons isu ini, termasuk dengan meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016

---

<sup>7</sup> Maya Justin & Nivedita Menon, "Reimagining environmental governance through intersectional ecofeminism," *Journal of Environmental Studies and Sciences* 12, no. 4 (2022): 501–514.

<sup>8</sup> Aicha Benabed, "Indigenous ecofeminism: Decolonizing the environment and reclaiming the sacred," *Environmental Humanities Review* 32, no. 2 (2020): 77–95.

sebagai bentuk komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-13. Namun demikian, hingga kini, kemajuan kebijakan iklim di Indonesia masih terbatas. Menurut *Climate Change Performance Index (CCPI) 2024*, Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 67 negara, dengan performa yang tergolong rendah dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca dan kebijakan iklim. Target dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* pun masih belum sejalan sepenuhnya dengan semangat Perjanjian Paris, karena masih berlandaskan pendekatan ekonomi bisnis semata.

Padahal, keberhasilan dalam membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan akan sangat memengaruhi tercapainya target-target pembangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat isu lingkungan yang lintas sektor, di mana solusi iklim akan berdampak pada bidang-bidang lain. Sebagai contoh, tanpa strategi adaptasi iklim yang konkret, perubahan iklim dapat memperburuk ketahanan pangan (SDG 2), mengganggu ketersediaan air bersih (SDG 6), bahkan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8 dan 10), mengingat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat dampaknya.<sup>9</sup>

Salah satu penyebab minimnya efektivitas upaya mitigasi dan adaptasi iklim di Indonesia adalah kurangnya penerapan pendekatan sosial dan kultural. Padahal, strategi berbasis komunitas dan lokalitas justru berpotensi menjadi pendekatan utama dalam mendorong aksi iklim yang inklusif dan kontekstual. Seperti halnya dalam implementasi SDGs lainnya, faktor sosial budaya menjadi elemen kunci dalam menjamin keberhasilan.<sup>10</sup> Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan iklim, salah satunya melalui pemanfaatan kearifan lokal. Dalam konteks ini, pendekatan iklim berkemajuan menjadi sangat penting, yaitu pendekatan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, dan penguatan partisipasi lokal. Pendekatan ini mencakup konservasi hutan berbasis masyarakat, penguatan tata kelola wilayah adat, serta integrasi nilai-nilai lokal dan

---

<sup>9</sup> Dagnachew, A. G., Hof, A. F., van Vuuren, D. P., & van Vliet, J. (2021). The role of energy demand reduction in achieving climate targets and SDGs. *Environmental Research Letters*, 16(5)

<sup>10</sup> Dalam Simarmata, R., & Indrawati, D. (2022). *Aksi Iklim dan Masyarakat Adat: Jalan Menuju Keberlanjutan* (hlm. 75–90). Jakarta: Pustaka Iklim Nusantara.

ilmiah dalam kebijakan iklim dan pembangunan.

## 2. Peran Perempuan Adat Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan Di Papua

Kompleksitas identitas yang dimiliki oleh setiap perempuan membuat derajat kerentanan dan peran yang berkaitan dengan perubahan iklim juga dapat berbeda-beda. Dalam hal ini, peran strategis perempuan adat berkaitan erat dengan pengetahuan, kebiasaan, dan interaksi intens mereka dengan alam. Pengetahuan lokal perempuan adat dibentuk langsung melalui pengamatan dan pengalaman selama bertahun-tahun yang secara alamiah membentuk pemahaman akan praktik terbaik yang dapat dilakukan untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Perempuan adat di Papua memainkan peran sentral dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengetahuan ekologis tradisional dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai penjaga ekosistem yang vital bagi kehidupan komunitas mereka.

Perempuan adat di Papua memiliki pengetahuan ekologis yang kaya, yang diwariskan secara turun-temurun melalui pendidikan adat, cerita rakyat, dan praktik budaya lainnya. Pengetahuan ini mencakup teknik pertanian berkelanjutan, pemanfaatan tanaman obat, dan pengelolaan hutan secara komunal. Misalnya, di Kampung Womom dan Resye, perempuan terlibat aktif dalam berkebun dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan musim dan kondisi lingkungan. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan perempuan adat.<sup>11</sup> Degradasi lingkungan, seperti kebakaran hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, mengurangi akses mereka terhadap sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, perempuan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pangan lokal akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.<sup>12</sup>

Meskipun menghadapi tantangan, perempuan adat menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi, seperti pembuatan kebun pekarangan sebagai cadangan pangan, serta

---

<sup>11</sup> Chamim, M., Wulandari Samosir, H. T., Karafir, M. T., Pasapan, E. L., Kalmirah, J., & Retno Putri, H. (2024). *Ibu Bumi Papua: Relasi Perempuan Adat dengan Alam di Tanah Papua*. Jakarta: WRI Indonesia.

<sup>12</sup> Betahita. (2024). "Kisah Perempuan Adat Papua: Hutan, Ruang Hidup yang Kian Terancam." *Betahita*. Diakses dari <https://papua.betahita.id/news/detail/6178/kisah-perempuan-adat-papua-hutan-ruang-hidup-yang-kian-terancam.html>

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Kampung Womom dan Resye, perempuan berperan aktif dalam mengidentifikasi wilayah kelola dan mengembangkan produk olahan lokal sebagai alternatif ekonomi. perempuan adat sering menghadapi hambatan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.<sup>13</sup> Struktur sosial dan budaya yang patriarkal membatasi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan kebijakan. Selain itu, ketimpangan gender dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak perempuan adat memperburuk situasi mereka .

Untuk meningkatkan peran perempuan adat dalam upaya iklim berkelanjutan, diperlukan pemberdayaan dan pengakuan hak-hak mereka. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan pelatihan, akses informasi, dan platform untuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Penting juga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

### **1. Kondisi di Provinsi Papua**

Provinsi Papua, setelah pemekaran wilayah, kini mencakup wilayah timur laut Pulau Papua dengan ibu kota di Jayapura. Wilayah ini memiliki topografi beragam mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan dan hutan hujan tropis yang kaya biodiversitas. Sungai Mamberamo sebagai sungai utama menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Dengan penduduk yang mayoritas terdiri dari suku-suku asli seperti Sentani, Tobati, dan Mamberamo, Provinsi Papua tetap menjadi pusat budaya, pendidikan, dan pemerintahan di Tanah Papua. Meskipun infrastruktur relatif lebih maju dibanding wilayah pegunungan, tantangan seperti kesenjangan sosial, akses layanan dasar, dan perlindungan lingkungan masih terus menjadi fokus utama pembangunan di provinsi ini.<sup>14</sup> Setelah pemekaran wilayah pada tahun 2022, merupakan provinsi induk dari Tanah Papua yang kini meliputi wilayah timur laut Pulau Papua dengan ibu kota di Jayapura. Secara geografis, provinsi ini mencakup wilayah pesisir utara, lembah-lembah subur, hingga kawasan hutan

---

<sup>13</sup> Suarapapua. (2021). "Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Tanah Papua." *Suara Papua*. Diakses dari <https://suarapapua.com/2021/11/28/lindungi-perempuan-adat-pembela-ham-dan-lingkungan-di-tanah-papua>

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2023). *Papua dalam angka 2023*. <https://papua.bps.go.id>

hujan tropis yang luas dan menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik seperti burung cenderawasih dan kasuari.

Sungai Mamberamo yang melintasi wilayah ini dikenal sebagai “Amazon-nya Papua” karena menjadi sumber air, pangan, dan transportasi penting bagi masyarakat adat. Masyarakat di Provinsi Papua terdiri dari berbagai suku asli seperti Sentani, Mamberamo, Tobati, dan Demta yang memiliki kearifan lokal kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Wilayah ini juga menjadi pusat administratif, pendidikan, dan pelayanan publik untuk kawasan Papua karena keberadaan bandara internasional, pelabuhan laut, serta institusi pemerintahan dan pendidikan tinggi.<sup>15</sup> Meski infrastrukturnya lebih maju dibanding provinsi baru hasil pemekaran, tantangan utama seperti kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah pedalaman, konflik lahan, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan tetap menjadi pekerjaan besar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan adat di Provinsi Papua juga memainkan peran penting sebagai penjaga hutan, pelestari tanah ulayat, dan pendidik ekologi generasi muda, menjadikan mereka bagian integral dari perjuangan menjaga kelestarian alam dan budaya Papua.

Perempuan adat Papua, sering disebut *Mama-mama*, aktif menolak pembalakan liar, ekspansi perkebunan sawit, dan tambang ilegal yang mengancam hutan dan sumber kehidupan mereka. Mereka mengorganisir aksi damai, menggalang dukungan masyarakat, serta mengadvokasi agar hak-hak adat diakui dan dihormati. Gerakan ini memperkuat posisi perempuan sebagai penjaga tanah adat sekaligus suara penting dalam menolak kerusakan lingkungan. Selain itu, perempuan Papua berperan sebagai pendidik lingkungan dalam komunitas mereka. Mereka mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga alam melalui kearifan lokal, seperti menghormati siklus alam, menjaga sumber air, dan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Pendidikan lingkungan ini disampaikan secara informal, lewat cerita adat, praktik harian, dan kelompok belajar di kampung-kampung adat. Melalui cara ini, nilai-nilai pelestarian alam diwariskan kepada anak-anak

---

<sup>15</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan status hutan Indonesia 2022*. <https://www.menlhk.go.id>

sehingga mereka tumbuh dengan kesadaran ekologis yang kuat.

Perempuan adat juga aktif dalam konservasi berbasis komunitas dengan menerapkan sistem rotasi tanam yang ramah lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, dan buah hutan secara lestari. Pendekatan ini membantu mencegah eksploitasi berlebihan terhadap hutan primer dan menjaga keanekaragaman hayati. Melalui praktek ini, mereka mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat.

Selain kegiatan di tingkat lokal, perempuan Papua kini semakin aktif dalam advokasi hukum dan kebijakan. Mereka terlibat dalam forum-forum adat, nasional, dan internasional untuk memperjuangkan pengakuan hak atas tanah adat dan perlindungan lingkungan hidup. Bersama organisasi masyarakat sipil dan lembaga hukum, perempuan adat memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan terkait wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam. Contoh nyata dari peran ini adalah perjuangan **Mama Yosepha Alomang**, tokoh perempuan Amungme yang aktif menentang eksploitasi tambang dan memperjuangkan hak perempuan adat. Selain itu, *mama-mama* pasar tradisional Jayapura menginisiasi pasar lokal yang ramah lingkungan dengan produk hasil hutan non-kayu, mendukung ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan berbagai peran tersebut, perempuan Papua tidak hanya menjadi penjaga tradisi dan alam, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam membangun masa depan yang berkelanjutan bagi komunitas dan lingkungan mereka di Tanah Papua.

## 2. Kondisi di Provinsi Papua Selatan

Papua Selatan adalah salah satu provinsi hasil pemekaran dari wilayah induk Papua yang secara geografis mencakup wilayah selatan Pulau Papua, termasuk kawasan dataran rendah dan pegunungan yang berbatasan dengan Papua Nugini di selatan dan barat. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terutama hutan hujan tropis, sungai besar seperti Sungai Digul, dan lahan subur yang menjadi sumber penghidupan bagi berbagai komunitas adat seperti suku Asmat, Marind, dan Awyu. Secara ekonomi, Papua Selatan masih didominasi oleh kegiatan subsisten masyarakat adat seperti berburu, meramu,

dan bertani ladang berpindah. Infrastruktur di wilayah ini relatif terbatas, terutama di daerah pedalaman yang sulit dijangkau, sehingga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar masih menjadi tantangan besar.<sup>16</sup>

Di Papua Selatan, perempuan adat memegang peran kunci sebagai penjaga hutan dan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Mereka mempraktikkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pengelolaan ladang berpindah (*swidden agriculture*) yang menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan ekosistem hutan. Perempuan adat di Papua Selatan juga semakin aktif dalam **advokasi lingkungan dan hak adat**. Mereka terlibat dalam menolak praktik pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit yang merusak hutan adat serta mengancam sumber penghidupan komunitas. Mereka menggunakan forum adat dan organisasi perempuan untuk menyuarakan penolakan terhadap perusahaan atau pihak luar yang mengeksploitasi alam tanpa persetujuan masyarakat.

Kabupaten Asmat, salah satu wilayah di Papua Selatan yang dikenal dengan hutan mangrove dan rawa-rawa luas, menjadi lokasi contoh nyata peran perempuan adat dalam pelestarian alam. Pada tahun-tahun terakhir, tekanan dari perusahaan pembalakan dan ekspansi perkebunan sawit sempat mengancam hutan dan sumber kehidupan masyarakat Asmat. Perempuan adat di Asmat, yang sering disebut *Mama Asmat*, mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok adat untuk melakukan patroli hutan, melaporkan aktivitas ilegal, dan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kerusakan hutan. Mereka juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan adanya pengakuan hak atas tanah adat serta perlindungan lingkungan. Salah satu inisiatif penting yang mereka lakukan adalah menjaga kawasan hutan mangrove sebagai daerah penyangga alami yang melindungi dari abrasi dan menjaga habitat ikan.

### 3. Kondisi Di Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya adalah salah satu provinsi baru hasil pemekaran dari wilayah Papua yang resmi berdiri pada tahun 2022. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Papua dan mencakup wilayah pesisir dan pegunungan

---

<sup>16</sup> International Work Group for Indigenous Affairs. (2021). *The Indigenous World 2021: Papua*. Diakses dari <https://www.iwgia.org>

dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk hutan hujan tropis, dataran rendah, dan daerah pesisir yang kaya akan sumber daya laut. Ibu kota provinsi ini adalah Teminabuan. Wilayah Papua Barat Daya dikenal dengan keanekaragaman budaya dan suku asli, seperti suku Maybrat, Kais, dan Konda. Masyarakatnya mayoritas masih mengandalkan mata pencaharian tradisional seperti bertani ladang berpindah, menangkap ikan, dan berburu. Infrastruktur di wilayah ini masih berkembang dengan tantangan aksesibilitas karena kondisi geografis yang sulit dan jarak yang jauh antar desa. Potensi alam Papua Barat Daya sangat besar, terutama dalam sumber daya hutan, hasil laut, dan keanekaragaman hayati. Namun, wilayah ini juga menghadapi ancaman dari pembalakan liar, perambahan hutan, dan tekanan pengembangan ekonomi yang bisa merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat.

Dalam konteks modern, perempuan adat Papua Barat Daya semakin aktif dalam advokasi dan perlindungan hak-hak atas tanah adat dan lingkungan hidup. Mereka terlibat dalam forum adat, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan penolakan terhadap pembalakan liar, perambahan hutan, serta kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit. Melalui advokasi ini, mereka memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adat serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Contoh nyata dari peran ini adalah bagaimana perempuan adat di beberapa komunitas di Teminabuan dan sekitarnya mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok perempuan adat untuk melakukan patroli hutan, kampanye lingkungan, dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Mereka juga aktif mendorong prakarsa pasar lokal yang berkelanjutan, misalnya dengan memasarkan produk hasil hutan non-kayu dan kerajinan tangan berbasis bahan alami yang mendukung ekonomi lokal tanpa merusak alam.

#### **4. Kondisi Di Papua Barat**

Provinsi Papua Barat terletak di bagian barat Pulau Papua, Indonesia, dan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragaman hayati serta budaya. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari daratan utama yang berbukit-

bukit dan pegunungan yang bergelombang, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk kepulauan Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya.<sup>17</sup>Perempuan adat di Raja Ampat memainkan peran sentral dalam menjaga kelestarian ekosistem ini melalui berbagai kegiatan konservasi yang berbasis komunitas. Mereka mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok untuk melakukan **patroli dan pemantauan hutan bakau**, mencegah penebangan liar dan konversi hutan menjadi tambak atau lahan pembangunan.

Perempuan adat juga melakukan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) hutan bakau di area yang rusak, menggunakan metode tradisional yang sudah terbukti efektif. Mereka juga terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut, memiliki pengetahuan luas mengenai pola hidup laut dan pentingnya menjaga terumbu karang. Mereka aktif mengedukasi masyarakat tentang **bahaya praktik penangkapan ikan destruktif** seperti bom ikan dan penggunaan bahan kimia yang dapat merusak karang. Melalui kelompok perempuan adat, mereka mendorong penggunaan teknik penangkapan yang ramah lingkungan dan pengelolaan kawasan konservasi laut secara mandiri. Perempuan adat di Raja Ampat sering kali menjadi motor penggerak dalam inisiasi **konservasi berbasis komunitas (*community-based conservation*)**. Mereka berpartisipasi dalam pembuatan zonasi kawasan konservasi laut yang membatasi akses penangkapan ikan di area-area sensitif, sekaligus menjaga hak-hak adat masyarakat atas wilayah perairan mereka. Melalui forum adat dan kelompok perempuan, mereka menjembatani komunikasi antara pemerintah, lembaga konservasi, dan komunitas lokal untuk mengimplementasikan program konservasi yang sesuai dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat.

## C.2 Keterbatasan Regulasi Perempuan Adat Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan

Di wilayah Papua, perempuan adat memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah, hutan, dan air sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritualitas mereka. Mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik-praktik seperti berburu lestari, pengumpulan hasil hutan bukan kayu, dan sistem pertanian ladang berpindah yang ramah

---

<sup>17</sup> Whitten, T., Mustafa, M., & Henderson, G. (2002). *The Ecology of Papua: Part One*. Periplus Editions

lingkungan.<sup>18</sup> Namun, dalam konteks kebijakan iklim dan lingkungan, perempuan adat Papua menghadapi lapis-lapis marginalisasi: sebagai perempuan, sebagai orang adat, dan sebagai warga dari wilayah yang seringkali diabaikan dalam pengambilan kebijakan nasional.

Regulasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Papua sebagian besar masih mengadopsi pendekatan sentralistik yang tidak selaras dengan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat adat setempat. Meski otonomi khusus Papua memberikan ruang hukum bagi pengakuan hak-hak adat, implementasinya belum berpihak pada perempuan adat. Hak ulayat yang diakui secara adat masih didominasi oleh laki-laki atau marga tertentu, sehingga perempuan tidak dilibatkan secara formal dalam pengambilan keputusan atas pemanfaatan tanah, hutan, atau perizinan investasi sumber daya alam<sup>21</sup>. Ketika terjadi perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, atau proyek infrastruktur, perempuan Papua sering kali menjadi kelompok pertama yang kehilangan akses terhadap sumber pangan, air bersih, dan ruang hidup yang aman.<sup>19</sup>

Di sisi lain, keterbatasan partisipasi perempuan Papua dalam program mitigasi perubahan iklim juga mencerminkan kurangnya pendekatan interseksional dalam desain kebijakan iklim nasional. Misalnya, dalam proyek-proyek konservasi berbasis karbon di Tanah Papua (seperti inisiatif REDD+), perempuan jarang dilibatkan sejak awal perencanaan. Ketidakterlibatan ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme khusus yang memastikan representasi perempuan adat dalam proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta rendahnya akses terhadap informasi teknis dan hukum yang dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi mereka secara kritis.<sup>20</sup>

Lebih jauh, perempuan adat Papua juga mengalami kekerasan struktural dan kultural ketika melawan ekspansi industri ekstraktif. Beberapa laporan mencatat bahwa perempuan yang menolak penggusuran atau kerusakan lingkungan kerap mengalami intimidasi, stigmatisasi, hingga kriminalisasi. Dalam banyak kasus, mekanisme perlindungan hukum belum memadai untuk merespons secara adil kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan Papua sebagai penjaga wilayah adat yang terdampak langsung oleh krisis iklim. Oleh karena itu, agenda iklim berkelanjutan di Papua tidak dapat dilepaskan dari reformasi regulasi yang secara spesifik mengakui hak-hak perempuan adat. Diperlukan model kebijakan berbasis hak yang

---

<sup>18</sup> The Gecko Project & Mongabay. (2021). *Tanah Papua: The Forest, the People, and the Palm Oil Threat*. <https://thegeckoproject.org>

<sup>19</sup> Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. (2022). *Krisis Tanah Ulayat dan Ketimpangan Gender di Papua: Studi Kasus Perempuan Malind dan Auyu*. <https://pusaka.or.id>

<sup>20</sup> UNDP Indonesia. (2019). *Gender Assessment of REDD+ in Papua Province*. United Nations Development Programme.

menempatkan perempuan Papua bukan hanya sebagai “penerima manfaat”, tetapi sebagai subjek hukum dan penentu arah pembangunan ekologis. Pendekatan ini harus menjamin keterlibatan perempuan dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga distribusi manfaat, serta melindungi mereka dari dampak negatif kebijakan yang tidak berpihak.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan adat Papua memiliki peran krusial dalam upaya iklim berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan kearifan lokal dan praktik tradisional yang ramah lingkungan. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, tekanan sosial, dan norma budaya patriarkal, perempuan adat tetap berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya. Pengakuan terhadap peran strategis perempuan adat sangat penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dan kearifan lokal ke dalam kebijakan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Perlu adanya peningkatan kapasitas dan akses pendidikan bagi perempuan adat, penguatan perlindungan hak atas wilayah adat, serta pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, pelibatan perempuan adat dalam perencanaan dan implementasi program iklim harus diperluas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam dinamika budaya dan hambatan struktural yang memengaruhi partisipasi perempuan adat, guna mendukung kebijakan dan program yang lebih efektif dan inklusif.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Aïcha Benabed. (2020). Indigenous ecofeminism: Decolonizing the environment and reclaiming the sacred. *Environmental Humanities Review*, 32(2), 77–95.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2023). *Papua dalam angka 2023*. <https://papua.bps.go.id>
- Betahita. (2024). Kisah perempuan adat Papua: Hutan, ruang hidup yang kian terancam. *Betahita*. <https://papua.betahita.id/news/detail/6178/kisah-perempuan-adat-papua-hutan-ruang-hidup-yang-kian-terancam.html>
- Chamim, M., Wulandari Samosir, H. T., Karafir, M. T., Pasapan, E. L., Kalmirah, J., & Retno Putri, H. (2024). *Ibu Bumi Papua: Relasi perempuan adat dengan alam di Tanah Papua*. Jakarta: WRI Indonesia.
- Dagnachew, A. G., Hof, A. F., van Vuuren, D. P., & van Vliet, J. (2021). The role of energy demand reduction in achieving climate targets and SDGs. *Environmental Research Letters*, 16(5).

- International Work Group for Indigenous Affairs. (2021). *The Indigenous World 2021: Papua*. <https://www.iwgia.org>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan status hutan Indonesia 2022*. <https://www.menlhk.go.id>
- Kings, A. E. (2017). Intersectionality and the changing face of ecofeminism. *Ethics and the Environment*, 22(1), 63–87.
- Gonsalves, L., & Kambuaya, M. (2020). Peran perempuan adat Papua dalam pelestarian hutan dan pengetahuan lokal. *Warta Lingkungan Papua*, 6(1), 22–30. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-perempuan-adat-dengan-alam-di-tanah-papua>
- Justin, M., & Menon, N. (2022). Reimagining environmental governance through intersectional ecofeminism. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 12(4), 501–514.
- Perdu Manokwari. (2021). *Paralegal lingkungan: Penguatan perempuan adat dalam perlindungan wilayah hidup di Papua Barat* [Laporan Program]. <https://perdu.or.id>
- Intaning, S. (2019). Diskursus teori tentang peran perempuan dalam konflik agraria. *BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 70–73.
- Simarmata, R., & Indrawati, D. (2022). Aksi iklim dan masyarakat adat: Jalan menuju keberlanjutan (hlm. 75–90). Jakarta: Pustaka Iklim Nusantara.
- Suarapapua. (2021). Lindungi perempuan adat pembela HAM dan lingkungan di Tanah Papua. *Suara Papua*. <https://suarapapua.com/2021/11/28/lindungi-perempuan-adat-pembela-ham-dan-lingkungan-di-tanah-papua>
- The Gecko Project & Mongabay. (2021). *Tanah Papua: The forest, the people, and the palm oil threat*. <https://thegeckoproject.org>
- UNDP Indonesia. (2019). *Gender assessment of REDD+ in Papua Province*. United Nations Development Programme.
- Shiva, V. (1997). Biopolitics: A feminist critique. Dalam M. Mies & V. Shiva (Eds.), *Ecofeminism* (hlm. 66–81). London: Zed Books.
- Whitten, T., Mustafa, M., & Henderson, G. (2002). *The ecology of Papua: Part one*. Periplus Editions.
- Yayasan Pusaka. (2022). Krisis tanah ulayat dan ketimpangan gender di Papua: Studi kasus perempuan Malind dan Auyu. <https://pusaka.or.id>

Yayasan Pusaka. (2023). Memastikan hak perempuan adat dalam proses FPIC di Papua.  
<https://pusaka.or.id>